



**Judul** : Cegah Kasus Perundungan - DPR: Perkuat Peran Guru BK  
**Tanggal** : Senin, 13 November 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 8

## Cegah Kasus Perundungan **DPR: Perkuat Peran Guru BK**

WAKIL Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf meminta peran Guru Bimbingan dan Konseling (BK) diperkuat dalam rangka mencegah kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Kasus perundungan kerap terjadi setahun belakangan ini.

"Banyak yang mengatakan bahwa perundungan muncul baru-baru ini. Padahal, waktu masih kecil pun kita pernah melewati fase-fase itu semua. Tapi kemudian karena adanya media sosial (medsos) akhirnya muncul ke permukaan," kata Dede Yusuf, di Jakarta, kemarin.

Kemendikbudristek diketahui telah membentuk satuan tugas (satgas) Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) untuk mengatasi kekerasan di lingkungan pendidikan. Selain itu, sejumlah kementerian/lembaga pun dibentuk untuk atasi kekerasan yang marak ini, seperti Komite Perlindungan Anak dan Ibu, Kementerian Dalam Negeri, dan lainnya.

Hanya saja, upaya antisipasi kekerasan dan perundungan ini belum sampai melibatkan Kepolisian dan para guru BK di dalam Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). "Pertanyaannya adalah bagaimana menjadikan (guru) BK ini lebih kuat pergerakannya?" ujar Dede Yusuf.

Karena kalau tidak ada upaya penguatan BK, sambungnya, kebijakan yang diambil akhirnya hanya sekadar melaksanakan fungsi-fungsi pencegahan. Tetapi tidak disertai langkah eksekusi sehingga akhirnya, kasus-kasus kekerasan dan perundungan dikembalikan kepada kepala sekolah. "Kalau kepala sekolah tidak tahu harus berbuat apa, maka ujung-ujug nanti kepada masalah hukum," terangnya.

Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat ini mengatakan, Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menyampaikan isu besar terkait tiga dosa besar di lingkungan pendidikan. Tiga dosa tersebut yakni kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Hanya saja, kebijakan mencegah dan mengatasi

tiga dosa besar ini belum ada. "Ya dosa besarnya ini harus ada strategic plan-nya dong. Strategic plan-nya apa? Ya preventifnya, promotifnya dan kuratifnya. Kalau di dalam bahasa kesehatan begitu," ungkapnya.

Menurutnya, kebijakan preventif ini harus jelas siapa yang melaksanakannya. Apakah orang tua, guru di lingkungan sekolah dan lainnya. Begitu kebijakan promotifnya, siapa yang nanti akan menjalankan fungsi mensosialisasikan, memberikan pelatihan dan dukungan lainnya. "Baru kita bicara kuratif, berarti ketika harus mengobati secara eksekusinya, siapa yang melaksanakannya?" sambung Dede Yusuf.

Karena itu, pelibatan kepolisian juga penting dalam mencegah tiga dosa besar versi Menteri Nadiem ini. Sehingga BK dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bukan malah menjadi "Babinsa" di dalam lingkungan pendidikan. "Nah di sini masalahnya makanya, harus disampaikan, saya bilang, kalau perlu ada aparat penegak hukum yang bisa kita libatkan," tambah dia.

Sementara Ketua Umum ABKIN Muh. Farozin menilai, ada miskonsepsi terkait soal tiga dosa besar di lingkungan pendidikan. Istilah tiga dosa besar pendidikan ini terkesan reduksionistik dan generalisasi yang berlebihan. Karena, pendidikan merupakan upaya normatif yang bertujuan membawa individu dari kondisi apa adanya menuju kondisi yang seharusnya.

"Tiga dosa besar pendidikan harus dipahami secara proporsional sebagai permasalahan pendidikan yang bersifat prioritas dan mendesak untuk ditangani secepat dan seefektif mungkin," tegas Farozin.

Farozin mengatakan, sejatinya guru BK telah dibekali kapasitas untuk melakukan deteksi dini dan memitigasi permasalahan perilaku maladaptif yang dialami oleh peserta didik. Karena itu guru BK harus memiliki latar belakang sarjana pendidikan dalam bidang BK dan memiliki kemampuan untuk mengatasi terjadinya perundungan pada satuan pendidikan. ■ KAL